

**ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI POLRI
DALAM IMPLEMENTASI PEMOLISIAN DEMOKRATIS**

Gatot Hendro Hartono¹, Nani Muksin², Hardy R. Hermawan³

¹Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³Praxa Institute, Jakarta, Indonesia

e-mail: prawiratama2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis framing media terhadap strategi komunikasi Polri dalam kerangka pemolisian demokratis melalui pemberitaan lima media daring tier satu, yaitu Kompas, Detik, Antara, Republika, dan BBC Indonesia, pada periode Januari 2024 hingga Desember 2025. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya peran komunikasi kepolisian pasca terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola framing media dan posisinya dalam wacana legitimasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Entman. Unit analisis mencakup pendefinisian masalah, penentuan penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penanganan dalam teks berita. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi framing antarmedia yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis dan posisi institusional media. Media nasional cenderung menekankan profesionalisme dan stabilitas. Media asing lebih menyoroti aspek demokrasi dan hak sipil. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa komunikasi Polri dalam wacana media berfungsi sebagai praktik legitimasi yang dimediasi oleh logika media. Pemolisian demokratis terbentuk melalui proses konstruksi makna yang bersifat simbolik dan dinamis.

Kata Kunci: Analisis Framing, Model Entman, Pemolisian Demokratis, Strategi Komunikasi, Media Online

PENDAHULUAN

Pemolisian demokratis (*democratic policing*) merupakan paradigma kepolisian yang menempatkan legitimasi publik sebagai fondasi utama pelaksanaan kewenangan negara. Kepolisian tidak hanya dinilai dari efektivitas koersif, tetapi dari sejauh mana kebijakan dan tindakan dipersepsikan adil, sah, dan dapat diterima secara moral oleh masyarakat (Bottoms & Tankebe, 2017; Tyler & Jackson, 2015; Jackson et al., 2015). Legitimasi dibangun melalui interaksi berkelanjutan antara institusi kepolisian dan warga negara, terutama melalui komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif (Manning, 2018; Bonner, 2019; Muntingh et al., 2021).

Dalam demokrasi modern, komunikasi institusional menjadi elemen kunci dalam membentuk hubungan polisi–masyarakat. Media massa berfungsi sebagai arena utama di mana kebijakan dan tindakan kepolisian diproduksi ulang menjadi wacana publik (Scheufele, 2017; Van Zoonen & Vliegthart, 2016; Eriyanto, 2017). Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menafsirkan dan membingkai realitas sosial. Persepsi publik terhadap Polri sangat dipengaruhi oleh bagaimana media menyeleksi dan menekankan pesan institusi (Chong & Druckman, 2016).

Framing media menjadi mekanisme penting dalam pembentukan makna sosial. Entman menjelaskan framing bekerja melalui empat perangkat: pendefinisian masalah, atribusi sebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi (Entman, 1993; Scheufele, 2017). Dalam isu kepolisian, framing dapat menentukan apakah tindakan Polri dipahami sebagai perlindungan masyarakat atau justru sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, framing sarat nilai dan kepentingan yang berpotensi memperkuat atau melemahkan legitimasi kepolisian (Eriyanto, 2017; Bonner, 2019; Manning, 2018).

Di Indonesia, hubungan Polri–media–masyarakat berubah signifikan pasca reformasi. Kebebasan pers dan penetrasi media digital memperluas ruang kritik publik terhadap kepolisian (Heryanto, 2019; Eriyanto, 2017). Polri dituntut beradaptasi dengan lingkungan komunikasi yang lebih terbuka, di mana narasi institusional mudah ditantang oleh narasi alternatif (Scheufele, 2017). Upaya Polri merespons tantangan ini tercermin dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kehumasan. Regulasi ini menegaskan komunikasi publik sebagai fungsi strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengelola informasi, serta memperkuat akuntabilitas institusi (Muntingh et al., 2021; Burke, 2020).

Namun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada framing media. Media memiliki logika pemberitaan sendiri yang sering tidak sejalan dengan tujuan institusional. Konflik, kontroversi,

dan kegagalan institusi sering ditonjolkan karena nilai berita tinggi, sehingga memengaruhi persepsi publik (Bonner, 2019; Manning, 2018). Periode 2024–2025 menjadi penting karena ditandai dinamika politik nasional, transisi kepemimpinan, serta meningkatnya perhatian publik terhadap profesionalisme aparat. Media online tier-1 seperti Kompas, Detik, Antara, Republika, dan BBC Indonesia berperan besar membentuk agenda publik terkait kepolisian (Scheufele, 2017; Van Zoonen & Vliegenthart, 2016).

Untuk memahami dinamika tersebut, teori framing menjadi kerangka analitis yang relevan. Framing menjelaskan konstruksi realitas sosial melalui seleksi dan penekanan aspek tertentu dalam pemberitaan media. Entman mendefinisikan framing sebagai proses memilih aspek realitas agar lebih menonjol untuk mempromosikan definisi masalah tertentu (Chong & Druckman, 2016; Scheufele, 2017). Framing bekerja melalui empat perangkat: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation (Eriyanto, 2017). Dalam kebijakan publik, framing membangun legitimasi atau delegitimasi, dipengaruhi ideologi media, ekonomi, dan relasi kekuasaan (Van Zoonen & Vliegenthart, 2016; Bonner, 2019).

Selain itu, legitimasi kepolisian berakar pada penerimaan moral masyarakat terhadap otoritas, bukan sekadar rasa takut pada sanksi (Bottoms & Tankebe, 2017; Tyler & Jackson, 2015). Legitimasi merupakan proses dialogis dinamis antara institusi dan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas (Muntingh et al., 2021). Konsep ini erat dengan keadilan prosedural yang menekankan perlakuan adil, penghormatan hak, dan netralitas (Tyler & Jackson, 2015; Jackson et al., 2015; Burke, 2020). Karena media menjadi sumber utama informasi publik, legitimasi kepolisian dibentuk oleh representasi eksternal yang dimediasi framing media (Scheufele, 2017; Van Zoonen & Vliegenthart, 2016).

Dalam kerangka teori media dan konstruksi realitas, berita dipahami sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi nilai, ideologi, dan kekuasaan (Eriyanto, 2017; Bonner, 2019). Media menjadi arena wacana di mana narasi resmi berhadapan dengan narasi kritis masyarakat (Van Zoonen & Vliegenthart, 2016; Manning, 2018). Realitas tentang Polri di masyarakat merupakan hasil mediasi pesan institusi, praktik berita, dan interpretasi publik (Scheufele, 2017; Chong & Druckman, 2016).

Lebih jauh, democratic policing menekankan tiga prinsip utama: legitimasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Legitimasi berdasar pada keadilan serta keabsahan penggunaan wewenang (Bottoms & Tankebe, 2017; Tyler & Jackson, 2015). Akuntabilitas menuntut keterbukaan

melalui pengawasan publik dan mekanisme kontrol eksternal (Muntingh et al., 2021; Bonner, 2019). Partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pemolisian melalui ruang dialog dan kemitraan berkelanjutan (Burke, 2020; Manning, 2018).

Akhirnya, komunikasi kepolisian mencakup hubungan media, kehumasan, serta manajemen krisis. Komunikasi publik harus bersifat terbuka, dialogis, dan responsif (Manning, 2018; Burke, 2020; Bottoms & Tankebe, 2017). Kehumasan bertindak sebagai ujung tombak pengelola arus informasi (Eriyanto, 2017; Scheufele, 2017). Di era digital, transparansi dan respons cepat terhadap isu menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan publik (Bonner, 2019; Muntingh et al., 2021).

Dengan demikian, analisis framing media terhadap komunikasi Polri menjadi relevan secara akademik dan strategis. Model Entman memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola pendefinisian masalah, atribusi tanggung jawab, penilaian moral, dan rekomendasi kebijakan. Hasilnya diharapkan memberi gambaran jelas tentang posisi komunikasi Polri dalam wacana democratic policing serta implikasinya terhadap legitimasi dan kepercayaan publik (Bottoms & Tankebe, 2017; Bonner, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi dari proses komunikasi dan interaksi simbolik. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan strategi analisis *framing* untuk membedah cara media online menggambarkan serta mengonstruksi realitas strategi komunikasi Polri melalui penonjolan maupun pengaburan aspek tertentu.

Peneliti mengaplikasikan model analisis *framing* Robert N. Entman yang terdiri dari empat perangkat utama. Perangkat pertama, *Define Problems* (pendefinisian masalah), digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan isu komunikasi Polri. Perangkat kedua, *Diagnose Causes* (penentuan penyebab masalah), berfungsi menganalisis aktor atau faktor yang dianggap memicu isu tersebut. Perangkat ketiga, *Make Moral Judgement* (evaluasi moral), mengkaji pertimbangan norma dan nilai moral media dalam menilai tindakan kepolisian. Terakhir, perangkat *Treatment Recommendation* (rekomendasi penanganan), menelaah solusi atau arah tindakan yang ditawarkan media terkait komunikasi Polri dalam kerangka *democratic policing*.

Objek penelitian ini berfokus pada teks pemberitaan media online arus utama (*tier 1*) di Indonesia yang mengangkat isu komunikasi Polri dalam konteks *democratic policing*, mencakup aspek transparansi, komunikasi publik, pengelolaan kritik, legitimasi, dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi arsip berita online secara *purposive* berdasarkan kesesuaian tema dan kata kunci spesifik.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembacaan intensif terhadap seluruh teks berita, dilanjutkan dengan pengkodean berdasarkan empat perangkat *framing* Entman, interpretasi mendalam terhadap pola *framing* yang muncul, hingga penarikan kesimpulan yang mengaitkan temuan dengan konsep *democratic policing* dan strategi komunikasi institusi kepolisian.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menganalisis teks pemberitaan dari lima media daring arus utama di Indonesia: *Kompas*, *Detik*, *Antara*, *Republika*, dan *BBC Indonesia*. Pemilihan media didasarkan pada perbedaan ideologi, posisi kelembagaan, serta orientasi editorial yang memengaruhi framing terhadap strategi komunikasi Polri dalam kerangka pemolisian demokratis. Media arus utama memiliki peran penting sebagai pembentuk realitas simbolik karena jangkauan audiens luas dan legitimasi sosial tinggi (McQuail, 2010).

Kompas dan *Detik* dipilih karena basis ideologi nasionalis dan tingkat pembaca terbesar. Keduanya berfungsi sebagai agenda setter isu kebijakan nasional, dengan kecenderungan merepresentasikan institusi negara melalui kerangka stabilitas dan integrasi sosial (Hall et al., 1997). *Antara*, sebagai kantor berita pemerintah, menampilkan narasi resmi negara dan berfungsi sebagai legitimasi formal kebijakan publik (Manning, 2018). *Republika*, dengan basis ideologi Islam, membingkai isu melalui perspektif moral dan etika sosial, sesuai dengan teori framing yang menekankan pengaruh ideologi terhadap evaluasi normatif (Entman, 1993). Sementara itu, *BBC Indonesia* menghadirkan perspektif global dengan standar jurnalisme internasional, mengaitkan isu kepolisian dengan demokrasi dan hak asasi manusia (Van Zoonen, 2012).

Tabel 1 Rasional Pemilihan Media Penelitian

Media	Basis Ideologi / Posisi	Rasional Pemilihan
Kompas	Nasionalis	Agenda setter isu nasional

Detik	Nasionalis	Media daring dengan pembaca terbesar
Antara	Pemerintah	Representasi narasi resmi negara
Republika	Islam	Perspektif moral dan nilai keumatan
BBC Indonesia	Asing (Inggris)	Perspektif global dan standar internasional

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Rentang waktu penelitian ditetapkan 1 Januari 2024–25 Desember 2025, pasca terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini menjadi tonggak penguatan komunikasi publik Polri. Analisis framing dilakukan terhadap teks berita secara utuh, mencakup judul, lead, isi, narasumber, dan penutup, sesuai pandangan bahwa framing bekerja melalui struktur teks keseluruhan (Entman, 1993).

Pola Framing Media

Media nasionalis (Kompas, Detik) membingkai komunikasi Polri sebagai instrumen legitimasi untuk menjaga stabilitas nasional. Antara menekankan legalitas dan prosedural, memperkuat legitimasi formal institusi. Republika mengaitkan komunikasi Polri dengan dimensi moral dan keadilan sosial, sedangkan BBC Indonesia menyoroti aspek demokrasi, HAM, dan akuntabilitas publik. Variasi framing ini menunjukkan perbedaan ideologis yang signifikan.

Tabel 2 Pola Framing Media Berdasarkan Basis Ideologi

Basis Media	Kecenderungan Framing	Implikasi terhadap Komunikasi Polri
Nasionalis	Legitimasi dan stabilitas	Penguatan otoritas institusi
Pemerintah	Legalitas dan prosedur	Normalisasi kebijakan
Islam	Moral dan keadilan sosial	Evaluasi etis institusi
Asing	Demokrasi dan HAM	Tekanan reformasi dan transparansi

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Secara umum, framing legitimasi menjadi pola dominan. Komunikasi Polri digambarkan sebagai sarana membangun kepercayaan publik dan penerimaan sosial terhadap kewenangan kepolisian. Legitimasi dipahami sebagai kondisi psikologis dan normatif yang memungkinkan kepatuhan publik tanpa paksaan langsung (Tyler & Jackson, 2014). Media memperkuat narasi ini melalui penekanan pada profesionalisme dan komitmen institusi.

Selain itu, pola respons terhadap tekanan publik juga menonjol. Media mengaitkan komunikasi Polri dengan kritik masyarakat, isu viral, dan sorotan media sosial. Komunikasi institusi dibingkai sebagai tindakan reaktif untuk mengendalikan opini publik dan meredam eskalasi isu, mencerminkan karakter komunikasi kepolisian di era mediatik yang sensitif terhadap reputasi (Bonner, 2019).

Dalam kerangka pemolisian demokratis, variasi framing menunjukkan ketegangan antara kebutuhan legitimasi negara dan tuntutan akuntabilitas publik. Media berperan sebagai arena wacana yang menengahi hubungan tersebut, tidak sepenuhnya mengafirmasi narasi negara, namun juga tidak menolak otoritas institusi. Posisi ini sejalan dengan fungsi normatif media dalam demokrasi modern sebagai pengawas sekaligus penyalur informasi (McQuail, 2010).

Framing Media Berdasarkan Perangkat Entman

Analisis framing dalam penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman yang menempatkan media sebagai aktor utama dalam pembentukan makna sosial. Framing dipahami sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek realitas yang dilakukan secara sistematis melalui struktur teks berita. Empat perangkat framing — *define problems, diagnose causes, make moral judgement, treatment recommendation* — memungkinkan pembaca arah interpretasi media secara terstruktur dan dapat diperbandingkan lintas media (Entman, 1993).

Tabel 3 Perangkat Framing Entman sebagai Kerangka Analisis

Perangkat Framing	Fungsi Analitis		Fokus Analisis
Define Problems	Menentukan isu utama		Posisi komunikasi Polri
Diagnose Causes	Menetapkan masalah	sumber	Aktor dan faktor penyebab
Make Moral Judgement	Memberi normatif	penilaian	Nilai dan standar
Treatment Recommendation	Mengarahkan solusi		Harapan media

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Pendekatan ini relevan untuk menelaah strategi komunikasi Polri karena komunikasi kepolisian berada dalam ruang simbolik yang sarat kepentingan politik, tuntutan demokrasi, dan ekspektasi publik. Media tidak hanya menyampaikan pesan Polri, tetapi juga mengonstruksi makna sesuai orientasi ideologis dan logika jurnalistik masing-masing. Dengan demikian,

framing menjadi mekanisme utama yang menjelaskan perbedaan representasi komunikasi Polri dalam ruang publik (Scheufele, 1999).

1. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*)

Pendefinisian masalah dalam pemberitaan media menunjukkan kecenderungan kuat memosisikan strategi komunikasi Polri sebagai isu legitimasi institusional. Komunikasi kepolisian digambarkan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Isu komunikasi tidak dipahami sebagai aspek teknis, melainkan bagian dari relasi negara–warga. Hal ini sejalan dengan pandangan Entman bahwa framing awal membatasi ruang interpretasi audiens terhadap isu publik (Entman, 1993).

Media nasionalis seperti Kompas dan Detik mendefinisikan masalah komunikasi Polri dalam kerangka ketertiban dan integrasi nasional. Komunikasi dipahami sebagai sarana menjaga kejelasan informasi publik dan mencegah disruptsi sosial, mencerminkan kecenderungan media arus utama dalam mereproduksi wacana stabilitas negara (Hall et al., 1997). Antara menempatkan komunikasi sebagai kebutuhan penjelasan kebijakan dan prosedur institusional, sehingga lebih administratif (Manning, 2018). Republika menyoroti dimensi etika dan keadilan sosial, mengaitkan isu komunikasi dengan sensitivitas publik. Sementara itu, BBC Indonesia mendefinisikan komunikasi Polri sebagai bagian dari proses demokratisasi, menempatkannya sebagai indikator reformasi dan keterbukaan (Van Zoonen, 2012).

Tabel 4 Pendefinisian Masalah oleh Media

Media	Fokus Masalah	Kerangka Makna
Kompas	Stabilitas publik	Legitimasi nasional
Detik	Kejelasan informasi	Ketertiban sosial
Antara	Penjelasan kebijakan	Administrasi negara
Republika	Sensitivitas sosial	Etika dan keadilan
BBC Indonesia	Reformasi institusi	Demokrasi

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Pendefinisian masalah ini menentukan arah framing media. Perbedaan fokus mencerminkan orientasi ideologis dan kepentingan simbolik masing-masing. Entman menegaskan definisi masalah membentuk batas interpretasi yang sulit dilepaskan (Entman, 1993).

2. Penentuan Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)

Tahap ini menunjukkan perbedaan orientasi sesuai ideologi media. Kompas dan Detik mengaitkan masalah komunikasi Polri dengan dinamika situasional dan cepatnya arus informasi publik. Polri diposisikan sebagai institusi yang merespons tekanan eksternal, selaras dengan kecenderungan media arus utama meminimalkan atribusi kesalahan struktural (Hall et al., 1997).

Antara menempatkan penyebab pada kebutuhan koordinasi internal dan penyesuaian kebijakan, menekankan kontinuitas birokrasi (Manning, 2018). Republika menilai kurangnya empati dan kepekaan sosial sebagai sumber masalah, mencerminkan karakter media ideologis (Entman, 1993). BBC Indonesia menyoroti faktor struktural dan historis, seperti budaya organisasi dan reformasi kepolisian, sehingga penyebab ditempatkan pada proses institusional jangka panjang (Van Zoonen, 2012).

Tabel 5 Penentuan Penyebab Masalah oleh Media

Media	Penyebab Utama	Orientasi Atribusi
Kompas	Tekanan situasional	Eksternal
Detik	Dinamika informasi	Eksternal
Antara	Proses birokrasi	Internal administratif
Republika	Kurang empati	Moral sosial
BBC Indonesia	Struktur institusi	Reformasi

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Atribusi eksternal melindungi institusi dari kritik struktural, administratif menormalkan birokrasi, sementara moral dan struktural membuka ruang evaluasi kritis (Entman, 1993; Manning, 2018).

3. Evaluasi Moral (*Make Moral Judgement*)

Evaluasi moral menunjukkan standar normatif berbeda. Kompas dan Detik menggunakan profesionalisme dan kepatuhan hukum sebagai tolok ukur, menilai positif bila komunikasi menjaga ketertiban publik. Tyler menegaskan legitimasi tumbuh dari persepsi keadilan prosedural (Tyler & Jackson, 2014).

Antara menekankan legalitas formal, dengan bahasa evaluatif terbatas (Manning, 2018). Republika menggunakan nilai keadilan sosial dan kepentingan umat, menilai sensitivitas institusi secara eksplisit (Entman, 1993). BBC Indonesia menilai

komunikasi melalui standar demokrasi dan HAM, memosisikan Polri dalam kerangka akuntabilitas publik (Bonner, 2019).

Tabel 6 Evaluasi Moral Media terhadap Komunikasi Polri

Media	Standar Moral	Arah Penilaian
Kompas	Profesionalisme	Legitimasi
Detik	Ketertiban	Stabilitas
Antara	Legalitas	Kepatuhan
Republika	Keadilan sosial	Etika
BBC Indonesia	Demokrasi dan HAM	Akuntabilitas

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Evaluasi moral menegaskan perbedaan fungsi normatif media: profesionalisme dan legalitas memperkuat legitimasi, moral sosial membuka kritik etis, demokrasi dan HAM mendorong akuntabilitas.

4. Rekomendasi Penanganan (*Treatment Recommendation*)

Rekomendasi penanganan disampaikan implisit melalui narasi. Kompas dan Detik menekankan kecepatan dan kejelasan komunikasi, memperkuat fungsi humas sebagai alat stabilisasi sosial (Manning, 2018). Antara menekankan konsistensi kebijakan dan kepatuhan regulasi. Republika mendorong dialog sosial dan empati institusional, sejalan dengan prinsip partisipasi publik (Tyler & Jackson, 2014). BBC Indonesia menekankan transparansi dan evaluasi independen, mencerminkan standar democratic policing (Bonner, 2019).

Tabel 7 Rekomendasi Penanganan dalam Framing Media

Media	Arah Solusi	Orientasi
Kompas	Kejelasan informasi	Stabilitas
Detik	Respons cepat	Manajemen isu
Antara	Konsistensi kebijakan	Administratif
Republika	Dialog publik	Partisipatif
BBC Indonesia	Transparansi	Reformasi

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Solusi teknis menekankan manajemen informasi, administratif menekankan konsistensi kebijakan, partisipatif menekankan dialog sosial, dan struktural menekankan reformasi institusi (Entman, 1993; Bonner, 2019).

Variasi Framing Antarmedia

Variasi framing memperlihatkan bahwa ideologi dan posisi kelembagaan membentuk konstruksi makna komunikasi Polri. Media nasionalis menekankan legitimasi dan stabilitas, media pemerintah menekankan legalitas, media Islam menekankan moralitas, dan media asing menekankan demokrasi serta reformasi.

Kompas dan Detik menghasilkan framing moderat, Antara formal, Republika normatif, dan BBC Indonesia kritis. Variasi ini membentuk spektrum representasi komunikasi Polri dalam ruang publik.

Tabel 8 Sintesis Variasi Framing Antarmedia

Media	Framing Dominan	Posisi Wacana
Kompas	Legitimasi	Konsensus
Detik	Respons	Peristiwa
Antara	Legalitas	Negara
Republika	Moral	Evaluatif
BBC Indonesia	Demokrasi	Kritis

Sumber: Hasil **Penelitian (2026)**

Scheufele menegaskan bahwa perbedaan framing merupakan konsekuensi pluralitas sistem media (Scheufele, 1999), sementara McQuail menempatkan variasi ini sebagai ciri media demokratis (McQuail, 2010).

Framing media memperlihatkan kecenderungan selaras dengan prinsip legitimasi, melalui penekanan pada profesionalisme dan otoritas formal. Media arus utama menampilkan komunikasi Polri sebagai sarana menjaga penerimaan sosial terhadap kewenangan kepolisian (Tyler & Jackson, 2014).

Dimensi akuntabilitas muncul melalui penjelasan prosedural, klarifikasi kebijakan, dan respons atas kritik publik. Media memposisikan komunikasi Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban simbolik (Manning, 2018).

Partisipasi publik lebih terbatas, muncul terutama dalam framing media ideologis dan asing. Media nasionalis cenderung menempatkan publik sebagai penerima informasi. Pola ini sejalan

dengan pandangan bahwa partisipasi sering tereduksi menjadi komunikasi satu arah (Bottoms & Tankebe, 2017).

Hubungan antara komunikasi institusional dan logika media menghasilkan framing yang tidak selalu sejalan dengan maksud institusi. Framing dapat menggeser makna pesan institusional melalui seleksi dan penekanan tertentu (Entman, 1993).

Framing media memiliki implikasi strategis terhadap legitimasi kepolisian. Framing yang menekankan profesionalisme dan kepatuhan hukum memperkuat legitimasi, sementara framing kritis berpotensi melemahkan kepercayaan publik.

Ekspektasi transparansi mendorong tekanan keterbukaan. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, risiko delegitimasi meningkat. Bottoms dan Tankebe menegaskan bahwa legitimasi bersifat dialogis dan selalu dinegosiasikan (Bottoms & Tankebe, 2017).

Konsekuensi framing bagi manajemen komunikasi Polri adalah kebutuhan memahami media sebagai arena konstruksi makna. Strategi komunikasi yang tidak selaras dengan logika media berisiko mengalami distorsi. Manning menegaskan bahwa kepolisian modern harus mengelola komunikasi sebagai bagian dari tata kelola legitimasi (Manning, 2018).

Keberhasilan komunikasi Polri dalam kerangka pemolisian demokratis tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut diproduksi, dipersepsikan, dan dinegosiasikan dalam ruang mediatik. Strategi komunikasi Polri harus dirancang secara adaptif, memperhitungkan logika media, ekspektasi publik, serta prinsip demokrasi agar mampu menjaga legitimasi sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa media secara konsisten menempatkan komunikasi Polri sebagai instrumen simbolik dalam relasi antara negara dan publik. Komunikasi diposisikan sebagai medium penghubung antara otoritas negara dan masyarakat. Fungsi utama komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi. Komunikasi membentuk persepsi publik mengenai legitimasi, kewenangan, dan peran sosial kepolisian. Media berperan aktif dalam membingkai makna atas praktik komunikasi tersebut.

Pola framing yang terbentuk relatif stabil dan berulang. Media nasionalis menonjolkan profesionalisme aparat, stabilitas sosial, dan kepatuhan terhadap prosedur formal. Kantor berita negara memusatkan perhatian pada aspek legalitas, kesinambungan kebijakan, serta posisi

Polri sebagai pelaksana mandat negara. Media dengan basis ideologi Islam memberi ruang lebih luas pada dimensi moral, keadilan sosial, dan sensitivitas terhadap aspirasi umat. Media asing menempatkan komunikasi Polri dalam kerangka demokrasi liberal, hak sipil, serta akuntabilitas publik. Variasi ini menegaskan bahwa framing media tidak bersifat netral. Framing dipengaruhi oleh orientasi ideologis, kepentingan institusional, dan posisi media dalam ekosistem komunikasi politik.

Pola besar framing media menunjukkan dominasi kerangka legitimasi dan akuntabilitas. Komunikasi Polri dipresentasikan sebagai mekanisme pembenaran kewenangan dan bentuk pertanggungjawaban simbolik kepada publik. Partisipasi publik muncul secara selektif dan tidak merata. Publik lebih sering diposisikan sebagai penerima pesan. Ruang dialog muncul dalam situasi tertentu. Pemolisian demokratis dalam wacana media cenderung dimaknai sebagai kepatuhan prosedural dan transparansi administratif. Dimensi partisipatoris hadir secara terbatas dan kontekstual.

Posisi komunikasi Polri dalam wacana pemolisian demokratis berada pada persimpangan antara kepentingan institusional dan logika media. Komunikasi dipahami sebagai praktik manajerial legitimasi yang beroperasi dalam ruang mediatik. Media berfungsi sebagai arena negosiasi makna antara pesan resmi dan interpretasi publik. Ketegangan antara intensi institusional dan konstruksi media membentuk realitas sosial tentang kepolisian. Realitas ini bersifat dinamis dan bergantung pada konteks politik serta sosial.

Dengan demikian, pemolisian demokratis tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan praktik operasional. Pemolisian demokratis juga dibentuk oleh proses mediatik yang mengonstruksi makna, nilai, dan ekspektasi publik. Komunikasi kepolisian menjadi bagian integral dari tata kelola demokrasi kontemporer dan tidak dapat dipisahkan dari peran media dalam membentuk realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2018). Framing media dan konstruksi isu keamanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 145–160. <https://doi.org/10.22146/jsp.38521>
- Bonner, M. D. (2016). Rethinking debates on media and police reform in Argentina. *Policing & Society*, 26(8), 925–939. <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.993632>

- Bonner, M. D. (2019). What democratic policing is ... and is not. *Policing & Society*, 30(9), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1649405>
- Bottoms, A., & Tankebe, J. (2017). Police legitimacy and the authority of the state. *Annual Review of Criminology*, 1, 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092830>
- Bradford, B., Jackson, J., & Stanko, E. A. (2015). Contact and confidence: Revisiting the impact of public encounters with the police. *Policing & Society*, 25(3), 223–245. <https://doi.org/10.1080/10439463.2013.784288>
- Burke, K. C. (2020). Democratic policing and officer well-being. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 874. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00874>
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2016). Framing theory. *Annual Review of Political Science*, 19, 103–126. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-125014-084107>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R. M. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>
- Eriyanto. (2017). Media dan kekuasaan simbolik: Analisis framing dalam pemberitaan kebijakan publik. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8621>
- Heryanto, G. G. (2019). Media, demokrasi, dan institusi negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jsp.45127>
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2015). Procedural justice and police legitimacy. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 52(4), 475–515. <https://doi.org/10.1177/0022427814558355>
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2016). Media, kekuasaan, dan kepentingan publik. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 123–138. <https://doi.org/10.24912/jk.v8i2.176>
- Manning, P. K. (2018). Democratic policing in a changing world. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 12(4), 387–400. <https://doi.org/10.1093/police/pay040>
- Masduki. (2017). Framing media dalam konflik kebijakan keamanan. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 89–101. <https://doi.org/10.25008/jkisk.v2i2.128>
- McCombs, M. (2014). *Setting the agenda: Mass media and public opinion* (2nd ed.). Polity Press. <https://doi.org/10.1002/9781119180164>
- Muntingh, L., Faull, A., Redpath, J., & Petersen, K. (2021). Democratic policing: A conceptual framework. *Law, Democracy & Development*, 25, 121–147. <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2021/ldd.v25.5>

- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2015). Media, demokrasi, dan reformasi institusi keamanan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 203–219. <https://doi.org/10.22146/jsp.15635>
- Rahayu, R. (2020). Strategi komunikasi institusi negara di era media digital. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(2), 85–97. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.12641>
- Scheufele, D. A. (2017). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 67(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/jcom.12252>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315758901>
- Siregar, A. (2018). Media dan pembentukan opini publik terhadap aparat negara. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 55–70. <https://doi.org/10.24912/jk.v10i1.2345>
- Stone, C. E., & Ward, H. H. (2000). Democratic policing: A framework for action. *Policing & Society*, 10(1), 11–45. <https://doi.org/10.1080/10439463.2000.9964829>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2015). Moral solidarity, identification with the community, and the importance of procedural justice. *Justice Quarterly*, 32(5), 1–28. <https://doi.org/10.1080/07418825.2014.928916>
- Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. *Criminology*, 51(1), 103–135. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00291.x>
- Tyler, T. R., & Jackson, J. (2015). Popular legitimacy and the exercise of legal authority. *Annual Review of Law and Social Science*, 11, 301–322. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-120814-121734>
- Van Zoonen, L., & Vliegenthart, R. (2016). Power to the frame: Bringing sociology back to frame analysis. *European Journal of Communication*, 31(4), 410–425. <https://doi.org/10.1177/0267323116641327>
- Weaver, D. H. (2007). Thoughts on agenda setting, framing, and priming. *Journal of Communication*, 57(1), 142–147. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x>